

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dan jasa serta resiko kedepan. □ Perkembangan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan barang strategis lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan selama triwulan III bulan Juli - September 2024 dengan rincian harga sebagai berikut : Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,02. □ Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,89 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,34 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,41 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen. Sedangkan 1 kelompok mengalami deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa sebesar 0,29 persen. □ Tingkat deflasi Kabupaten Pesisir Selatan bulan September 2024 secara month to month (m-to-m) sebesar 0,42 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,37 persen. □ Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah Non IHK yang tidak melakukan penghitungan tingkat inflasi daerah, untuk perkembangan inflasi daerah mengacu kepada Kota Padang dengan memperhatikan harga pasar

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada awal triwulan III (bulan Juli) yaitu Penurunan harga Cabai merah keriting, Cabai rawit merah, dan cabe rawit hijau yang disebabkan oleh banyaknya pasokan dan dan banyaknya daerah tetangga yang panen raya sehingga terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. □ Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan III beras cap anak daro 12.500,- s/d Rp. 16.000,-/Kg. disebabkan oleh tingginya permintaan akan beras premium ini baik untuk Sumbar maupun diluar Sumbar, kenaikan biaya produksi seperti biaya penggilingan dan upah angkut transportasi sebagai akibat dari kenaikan BBM, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi musim panen di daerah lain □ Pada akhir triwulan III harga komoditas cabai keriting merah, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau dan komoditi lainnya stabil dan ketersediaan pasokan cukup, sehingga harga dapat dikendalikan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di daerah Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Datar yang telah dilaksanakan selama triwulan III berdasarkan aspek 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) adalah sebagai berikut : a. Keterjangkauan Harga • Pemantauan stok dan harga pangan tingkat Grosir • Pemantauan stok dan ketersediaan pangan tingkat produsen • Melakukan pemantauan harga dan stok pangan tingkat eceran • Pengawasan stok persediaan •

Pelaksanaan Sidak ke Pasar dan distributor. b. Ketersediaan Pasokan • Dilakukan juga gerakan menanam tanaman cabe serta Penanaman di Pekarangan ASN dan Non ASN, Wali Nagari dengan memanfaatkan pekarangan minimal 10 Polibag per ASN. • Melakukan percepatan Tanam dimasing-masing Kecamatan. • Memberikan mantuan benih dan saprodikepada petani • Pemantauan dan pengawalan pertanaman dilapangan dalam rangka pengamanan produksi dari serangan organism pengganggu Tanaman • Realisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) • Pemberian bantuan bibit Bawang Merah dan sarana/prasarana kepada kelompok tani • Penanaman cabe dalam polibag di 15 BPP dan diberikan bantuan kepada KK Miskin di 15 Kecamatan sebanyak 137.760 Polibag. c. Kelancaran Distribusi • Pendistribusian bantuan paket sembako untuk balita gizi buruk dan stantinyak 16 paket di kecamatan Koto XI Tarusan, 29 Paket di Kecamatan baying, 90 Paket di Kecamatan Sutura dan 10 paket di Kecamatan Lengayang paket tersebut berjumlah 145 Paket yang berasal dari pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pangan Sumatera Barat. • Koordinasi dengan distributor untuk kelancaran distribusi d. Komunikasi yang Efektif • Pelatihan Budidaya Tanaman Bawang di Kecamatan Ranah Pesisir. • Pelaksanaan kebijakan untuk Pengendalian Inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan mencakup Rapat Koordinasi dengan Mendagri dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang diadakan setiap senin jam 08.00 Wib sampai selsai yang dihadiri oleh Bupati/ Sekretaris Daerah/Forkopimda/OPD yang tergabung Dalam TPID/stakeholder • Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID setiap senin setelah zoom pengendalian inflasi bersama Mendagri. (18 Juli 2022) 18 Juli 22 28 juli 22) • Mengikuti High Level Meeting (HLM) Kota Bukittinggi. (3 Agust 22) • Mengikuti acara Rapat Pengawasan Pengendalian inflasi dengan Kemendagri yang dihadiri oleh beberapa menteri yang menyampaikan materi pengendalian inflasi untuk dilaksanakan di bawah jajaran kementerian oleh seluruh propinsi termasuk Polri dan TNI, Inspektorat melalui zoom meeting (23 agust 22) • Mengikuti acara Capacity Building TPID Se Sumbar ke Provinsi Jawa Tengah (Semarang) -24 Agust 22) • Mengikuti Rapat Koordinasi HLM TPID se Sumbar di Ruang Pertemuan Bank Indonesia Prov.Sumbar dengan agenda Pembahasan perkembangan dan tekanan inflasi terkini serta upaya pengendalian inflasi ditengah tingginya resiko inflasi Sumbar.(31 agust 22) • Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi di daerah dengan Presiden RI terhadap Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia melalui Zoom. • Mengikuti acara GNPIP se Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian inflasi di Daerah □ Program pemanfaatan pekarangan dengan mengeluarkan surat edaran untuk asn DAN Non ASN agar menanam cabai masing-masing 10 Polibag per ASN/NON SN dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kecukupan gizi keluarga untuk mencegah terjadinya stunting. □ Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau (AUTS/K) meringankan beban peternak ketika ternak mengalami kematian, dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) membantu petani yang mengalami gagal panen akibat musim kering yang tidak menentu serta serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. □ Pelaksanaan operasi pasar mampu menstabilkan harga di pasar □ Pemberian bantuan sosial dapat mendorong daya beli masyarakat dalam keterjangkauan harga akibat kenaikan harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah a. Pemantauan stok dan harga

pangan Tingkat Produsen b. Pemantauan stok dan harga pangan Tingkat Grosir c. Pemantauan stok dan harga pangan Tingkat eceran d. Program Pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap Penyusunan Peta Inflasi Tahun 2022-2024. e. Pelaksanaan Sidak ke Pasar f. Melaksanakan kegiatan - kegiatan teknis dengan perangkat daerah terkait yang menunjang pengendalian inflasi daerah sesuai dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) g. Melaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota untuk saling tukar informasi dalam pengendalian inflasi. h. Pelaksanaan rapat teknis terkait pengendalian inflasi. i. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka mengantisipasi harga terhadap kenaikan BBM.